BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh Negara Republik Indonesia. KPU melaksanakan tugas secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU terbagi menjadi 3 (tiga) bagian dalam menyelenggarakan pemilu yakni KPU Provinsi, KPU Kota, dan KPU Kabupaten (KPU Kota Semarang, 2021a).

Penelitian ini berfokus membahas pada tahapan penyelenggaraan pemilu yakni sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. KPU Kota Semarang berlokasi di Gedung Pandanaran Lantai 5, Jalan Pemuda Nomor 175, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 8 Tahun 2015), KPU Kota sebagai penyelenggara pemilu khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran,

2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi,
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya,
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapn penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi,
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah,
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi,
10. Menetapkan pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan,

11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota yang bersangkutan,
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi,
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Mengumumkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota;
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tentu ada peran serta dari anggota dan staf sekretariat KPU Kota Semarang. Berikut adalah struktur organisasi KPU Kota Semarang:

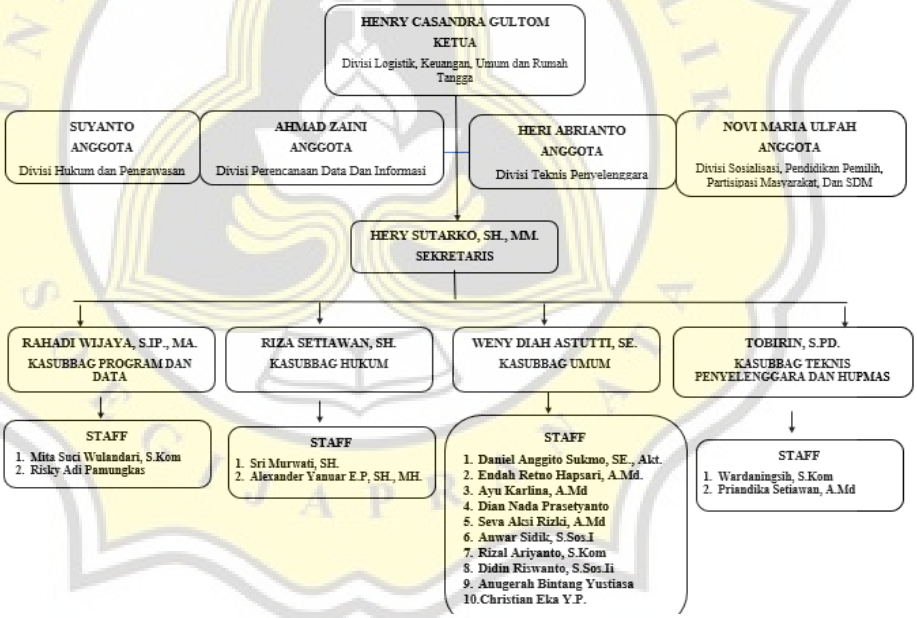

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi KPU Kota Semarang
Sumber: https://kpu-semarangkota.go.id/Sekretariat (diakses pada tanggal 30 Juli 2021)

KPU Kota Semarang memiliki 4 (empat) Divisi yakni: 1. Divisi Hukum Dan Pengawasan, 2. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi, 3. Divisi Teknis Penyelenggaraan Dan 4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Masyarakat, dan SDM. Keempat divisi tersebut membawahi 4 Sub-bagian dalam sekretariat KPU Kota Semarang yakni, Sub-bag Program Dan Data, Sub-bag Hukum, Sub-bag Umum, Sub-bag Teknis Penyelenggara Dan Hupmas.

KPU Kota Semarang pada Tahun 2020 sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Semarang 2020 memiliki salah satu tugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat. Tugas tersebut merupakan tanggung jawab dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dengan Subbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas. Sebagai perwujudan tugas tersebut maka dilakukan pembentukan program Relawan Demokrasi sesuai dengan arahan KPU RI melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

4.2. Relawan Demokrasi

Menurut Komisioner KPU Kota Semarang Novi Maria Ulfah, pembentukan Relawan Demokrasi sesuai dengan amanah PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dimana dijelaskan bahwa sasaran dari sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, partai politik, media massa, lembaga, dan pemilih basis tertentu. Relawan Demokrasi akan berfokus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilih basis

tertentu yang terdiri dari 10 (sepuluh) basis karena basis pemilih tersebut dirasa informasi kepemiluan masih kurang. (Lampiran 4, hal. a).

Tujuan dari pembentukan Relawan Demokrasi menurut SE KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan
2. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan dan demokrasi
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Meningkatkan kualitas Pemilihan.

Pada tahun 2020, KPU Kota Semarang membuka pendaftaran Relawan Demokrasi untuk Pilwakot Semarang Tahun 2020. Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor: 735/PP.06.2-PU/3374/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penerimaan Pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 bahwa KPU Kota Semarang menerima pendaftaran Relawan Demokrasi untuk sepuluh basis pemilih dengan total anggota 51 orang.

Kualifikasi dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh KPU Kota Semarang dalam menerima Relawan Demokrasi adalah seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Kualifikasi dan Persyaratan Administrasi Relawan Demokrasi

No.	Kualifikasi	Persyaratan Adminstrasi
1.	Warga Negara Indonesia	Fotokopi E-KTP yang masih berlaku/Surat Keterngan Domisili bagi pendaftar yang ber E-KTP dari luar Kota Semarang

2.	Usia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus Relawan Demokrasi basis pemilih pemula berusia maksimal 25 tahun.	Fotokopi Ijazah SLTA atau sederajat
3.	Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.	Pas Foto 4 x 6, 2 lembar pas foto (formal)
4.	Non partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota Partai Politik.	Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5.	Memiliki Komitmen menjadi relawan.	Surat pernyataan kesediaan menjadi Relawan Demokrasi
6.	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara atau melakukan tindak pidana
7.	Bertanggungjawab dan berakhlak baik.	Surat pernyataan bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020
8.	Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan Serentak 2020.	Sertifikat/Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang mempunyai). Contoh: kursus kepemiluan/jambore demokrasi, KPU *Goes To School*, KPU *Goes To Campus*/kegiatan KPU lainnya.
9.	Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan atau kemahasiswaan.	Membuat feature/karya tulis alasan menjadi Relawan Demokrasi maksimal 2 kwarto.
10.	Membuat Program Kerja yang akan dilaksanakan.	Daftar riwayat hidup
11.	Relawan demokrasi diutamakan: • Bagi Relawan Demokrasi basis pemilih warga internet, mampu membuat konten/desain/slogan/meme dan memiliki 3 akun media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dengan 1.000 followers. • Bagi Relawan Demokrasi basis komunitas, berkedudukan sebagai ketua atau anggota komunitas tertentu. • Bagi Relawan Demokrasi basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua atau anggota Lembaga penyandang disabilitas. • Bagi Relawan Demokrasi basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan non-PNS.	Menuliskan basis ajuan yang dipilih dipojok sebelah kanan atas amplop pendaftaran
12.	Kelengkapan berkas dapat diunduh di http://kota-semarang.kpu.go.id atau hardcopy bisa diambil di kantor (KPU Kota Semarang) pada jam kerja.	Fotokopi Ijazah SLTA atau sederajat

Sumber: Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor: 735/PP.06.2-PU/3374/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penerimaan Pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020

Relawan Demokrasi terdiri dari sepuluh basis pemilih strategis yaitu: 1. basis keluarga, 2. basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4. basis pemilih perempuan, 5. basis penyandang disabilitas, 6. basis pemilih berkebutuhan khusus, 7. basis kaum marjinal, 8. basis komunitas, 9. basis keagamaan, dan 10. basis warga internet. Tiap basis Relawan Demokrasi memiliki rincian jumlah anggota seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2

Rincian Jumlah Anggota Basis Relawan Demokrasi

No.	Basis	Jumlah
1.	Basis Keluarga	5 Orang
2.	Basis Pemilih pemula	5 Orang
3.	Basis Pemilih Muda	5 Orang
4.	Basis Penyandang disabilitas	5 Orang
5.	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus	5 Orang
6.	Basis Pemilih Perempuan	5 Orang
7.	Basis Kaum Marjinal	5 Orang
8.	Basis Komunitas	5 Orang
9.	Basis Keagamaan	6 Orang
10.	Basis Warga Internet	5 Orang

Sumber: Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor: 735/PP.06.2-PU/3374/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penerimaan Pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas KPU Kota Semarang Tobirin, menjelaskan bahwa pembentukan 10 (sepuluh) basis Relawan Demokrasi memiliki alasan-alasan tertentu. Basis keluarga dibentuk karena kehidupan manusia yang paling utama dan pertama ada di dalam keluarga. Selanjutnya basis pemilih pemula adalah masyarakat yang baru merasakan pemilu sehingga tidak terpatok umur seperti TNI, Polri yang sudah pensiun bisa dikatakan pemula.

Kemudian basis pemilih muda ditujukan pada mereka yang berusia 17–25 tahun. Selanjutnya basis penyandang disabilitas dibentuk untuk menyosialisasikan pada organisasi bidang disabilitas selain itu keterbatasan dari pihak KPU yang tidak bisa menggunakan bahasa isyarat dan membaca *braille*. Basis berkebutuhan khusus ditujukan pada masyarakat yang berada ditempat yang sulit diangkau serta minim informasi tentang kepemiluan.

Lebih lanjut dijelaskan, pembentukan basis perempuan karena angka DPT perempuan lebih tinggi dari laki-laki sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi. Basis marginal dibentuk agar dapat merangkul masyarakat marginal yang tidak memiliki kepercayaan diri dan sumber daya. Untuk basis komunitas dibentuk karena komunitas di Kota Semarang sangat banyak sehingga diharapkan dapat memperluas sasaran. Basis keagamaan dibentuk agar dapat merangkul seluruh 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia. Terakhir basis warganet dibentuk karena kemajuan teknologi yang sangat cepat sehingga KPU Kota Semarang harus menyesuaikan dan diharapakan Relawan Demokrasi dapat menangkal *hoax* di media sosial (Lampiran 5, hal. a).

KPU Kota Semarang dalam membentuk Relawan Demokrasi dimulai dengan membuka pendafataran bagi calon Relawan Demokrasi pada tanggal 10-21 Agustus 2020. Setelah melakukan seleksi administrasi berkas pada Relawan Demokrasi, didapatkan 95 orang yang lolos ke tahap tes wawancara. Tes wawancara ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2020 di Kantor KPU Kota Semarang. Kemudian pihak KPU Kota Semarang mengadakan rapat pleno dan

mengumumkan 51 nama yang direkrut menjadi Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi yang terpilih kemudian mengikuti pengukuhan dan pembekalan pada tanggal 29-30 Agustus 2020. Materi yang diberikan oleh KPU pada saat pembekalan untuk meningkatkan kompetensi Relawan Demokrasi yakni pentingnya demokrasi, pemilihan, dan partisipasi, pemahaman tentang teknis tahapan pemilihan yang strategis, kode etik Relawan Demokrasi, teknik komunikasi publik, dan materi lain yang berkaitan.

Berdasarkan data yang diperoleh, Relawan Demokrasi Semarang dibentuk untuk memberikan sosialisasi dan pendidiakn pemilih pada pemilih berbasis sesuai dengan amanah PKPU Nomor 8 Tahun 2017. Pembentukan 10 (sepuluh) basis Relawan Demokrasi dengan alasan sasaran basis pemilih yang diinginkan masih kurang informasi kepemiluan dan juga sesuai dengan gagasan dari KPU RI untuk membentuk 10 (sepuluh) basis Relawan Demokrasi sesuai dengan SE KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. KPU Kota Semarang dalam membentuk Relawan Demokrasi juga sudah menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai dengan SE KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 yakni pengumuman dan pendaftaran, seleksi dan pengumuman, serta pembekalan atau bimbingan teknis. Pembentukan 10 (sepuluh) basis pemilih sesuai dengan kebutuhan dari tiap basis seperti pada Pedoman Pelaksanaan Relasi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019.

4.3. Mendefinisikan Masalah PR

Dalam membentuk Relawan Demokrasi, KPU Kota Semarang memiliki beberapa alasan. Komisoner KPU Kota Semarang Novi Maria, menjelaskan pada sasaran 10 (sepuluh) basis pemilih tersebut dirasa informasi kepemiluan masih kurang. Maka dibentuklah Relawan Demokrasi agar dapat mencapai target partisipasi masyarakat yang cukup tinggi yakni 77,5%. Selain itu Kota Semarang memiliki DPT sebanyak 1.174.068 dimana itu bukan jumlah yang sedikit sehingga KPU Kota Semarang merasa SDM yang dimiliki belum mampu untuk mengjangkau seluruh masyarakat di Kota Semarang. Oleh karena itu KPU Kota Semarang perlu untuk merekrut SDM yang kredibel untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dapat menjangkau seluruh segmen. Dengan adanya Relawan Demokrasi diharapkan dapat menyamai kesuksesan Pemilu 2019 (Lampiran 4, hal. a).

Setiap basis Relawan Demokrasi tentunya memiliki kelompok sasaran masing-masing. Pada basis keluarga sasarannya adalah warga, perkumpulan RT/RW, perkumpulan bapak-bapak di daerah Semarang. Basis pemilih pemula menyasar pada masyarakat berusia 17-25 tahun di Kota Semarang yang biasanya tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, karang taruna, dan komunitas. Kemudian basis pemilih muda menyasar organisasi mahasiswa, karang taruna, dan juga masyarakat Kota Semarang. Basis penyandang disabilitas sasarannya adalah komunitas disabilitas, yayasan disabilitas, dan juga sekolah disabilitas. Basis berkebutuhan khusus menuju pada pondok pesantren, rumah sakit, panti sosial, lembaga pemasyarakatan (Lapas), masyarakat perbatasan, SLB, dan

komunitas difabel. Basis perempuan menyasar pada perkumpulan ibu–ibu yang tergabung dalam PKK, dasa wisma (Dawis). Basis marginal sasaran yang dituju adalah penyapu jalanan, pedagang, tukang ojek, nelayan, penjual bunga, pemulung, tukang becak. Kemudian basis komunitas menyasar pada komunitas-komunitas yang ada di Kota Semarang seperti SAPMA, Backpacker, Pengusaha Muda, IPNU, PPKBD, Bank Sampah, Assosiasai Multiflora, Posyandu Kasih Ananda, Persaudaraan Haji Saptamarga III, Rotari, Lari, UMKM, Dasa Wisma, Tennis, Forum Petani, Senam Adi Yuswo, Kopi Khas NU, PKL. Basis keagamaan menyasar pada umat dari 6 (enam) agama yang ada di Kota Semarang (Lampiran 14, hal. a). Relawan Demokrasi basis warganet menyasar seluruh warga kota Semarang sehingga tidak ada kelompok sasaran khusus.

Kelompok sasaran tersebut dipilih karena melihat dari sasaran Relawan Demokrasi di tahun sebelumnya. Selain itu juga menurut anggota Relawan Demokrasi ada kemudahan untuk menjangkau sasaran tersebut. Dimana sasaran tersebut dekat dengan daerah tempat tinggal, organisasi yang pernah diikuti, maupun masyarakat yang berkenan untuk menerima kedatangan Relawan Demokrasi. Hal itu menurut ketua basis warganet Anin, bertujuan agar lebih mudah untuk mengurus perizinan. Selain itu juga pembagian tanggung jawab dan kerjasama dilakukan dengan membagi tugas dalam membuat laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan (Lampiran 15, hal. a).

Setelah menentukan kelompok sasaran, Relawan Demokrasi mengajukan proposal persetujuan kepada KPU Kota Semarang. Setelah mendapatkan persetujuan dari KPU Kota Semarang maka Relawan Demokrasi akan mendapatkan surat tugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada sasaran yang dituju.

4.4. Merencanakan dan Menyusun Program

Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor: 735/PP.06.2-PU/3374/KPU-Kot/VIII/2020 menerangkan bahwa KPU Kota Semarang membuka pendaftaran Relawan Demokrasi pada tanggal 10-21 Agustus 2020 pukul 08.00-15.00 WIB. Berkas lamaran pendaftaran Relawan Demokrasi dikirimkan ke kantor KPU Kota Semarang. Berdasarkan hasil dari seleksi administrasi berkas pada Relawan Demokrasi, didapatkan 95 orang yang lolos ke tahap tes wawancara. Tes wawancara ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Semarang di Kantor KPU Kota Semarang. Dari hasil tes wawancara, pihak KPU Kota Semarang mengadakan rapat pleno dan mengumumkan 51 nama yang direkrut menjadi Relawan Demokrasi.

Sebelum terjun ke lapangan, Relawan Demokrasi mendapatkan pengukuhan dan pembekalan pada tanggal 29-30 Agustus 2020 pukul 08.00 di Hotel Dafam, Semarang. Materi dari pembekalan tersebut adalah pentingnya demokrasi, pemilihan, dan partisipasi; pemahaman tentang teknis tahapan pemilihan yang strategis; kode etik Relawan Demokrasi; dan teknik komunikasi publik.

Program Relawan Demokrasi direncanakan untuk bekerja selama 3 (tiga) bulan. Dimulai pada bulan September hingga November 2020. Relawan Demokrasi melakukan perencanaan dan penyusunan kegiatan dengan membuat agenda kegiatan karena Relawan Demokrasi harus mengunjungi 10 (sepuluh) lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam satu bulan sehingga keseluruhan kegiatan berjumlah 30 lokasi dalam waktu 3 (tiga) bulan, kemudian menentukan kelompok sasaran, mengajukan surat perizinan pada kelompok sasaran yang akan dikunjungi, mempersiapkan materi, dan merencanakan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing basis baik secara langsung dengan simulasi, *role playing*, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu sosialisasi maupun secara tidak langsung dengan mengunggah materi ke media sosial dan dialog interatif melalui media sosial atau media dalam jaringan (daring).

Berdasarkan SE KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020, materi yang disampaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi adalah pentingnya demokrasi, pemilihan, dan partisipasi; tanggal, hari, dan jam pemungutan suara; tata cara pemberian suara pada surat suara, pengenalan terhadap kontestan pemilihan; serta materi lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih. Pemaparan materi oleh Relawan Demokrasi merupakan pengaplikasian dari peran keluar sebagai humas pemerintah. Dimana Relawan Demokrasi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Pilwakot Semarang 2020 kepada masyarakat sasaran dalam 10 (sepuluh) basis pemilih.

4.5. Mengambil Tindakan dan Mengkomunikasikan

Relawan Demokrasi memulai kegiatan pada bulan September 2020. Berikut adalah rincian jumlah kegiatan Relawan Demokrasi pada tabel 4.3. Untuk rincian tanggal dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada lampiran 16.

Tabel 4. 3

Rincian Jumlah Kegiatan Relawan Demokrasi Semarang 2020

No.	Basis	Jumlah
1.	Basis Keluarga	30 kegiatan
2.	Basis Pemilih pemula	30 kegiatan
3.	Basis Pemilih Muda	30 kegiatan
4.	Basis Penyandang disabilitas	30 kegiatan
5.	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus	30 kegiatan
6.	Basis Pemilih Perempuan	30 kegiatan
7.	Basis Kaum Marjinal	30 kegiatan
8.	Basis Komunitas	30 kegiatan
9.	Basis Keagamaan	30 kegiatan
10.	Basis Warga Internet	30 kegiatan

Sumber: Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi Semarang Tahun 2020

Dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, setiap basis memiliki metodenya sendiri sesuai dengan kebutuhan dari basis tersebut. Ada secara langsung mengunjungi kelompok sasaran dengan cara diskusi kelompok dan menggunakan alat bantu seperti brosur, contoh surat suara, dan *print-out* materi sosialiasi dan pendidikan pemilih. Namun ada juga basis yang melalui *video conference* seperti Google Meeting atau Zoom Meeting karena pembatasan kegiatan di masa pandemi COVID-19. Selama berkegiatan tentunya ada kendala yang dialami oleh basis Relawan Demokrasi. Kendala yang sempat dialami adanya penolakan kepada basis berkebutuhan khusus dari panti wredha karena pihak panti wredha melakukan pembatasan kunjungan. Sehingga basis berkebutuhan khusus perlu untuk mencari sasaran pengganti.

Menurut wawancara dengan anggota basis Relawan Demokrasi, anggota dari setiap basis ada yang pernah bergabung menjadi Relawan Demokrasi di tahun sebelumnya namun ada juga yang baru bergabung di Pilwakot Semarang 2020. Dengan konsep seperti itu, Relawan Demokrasi yang pernah bergabung bisa membimbing anggota basisnya terhadap kondisi lapangan. Hal ini menjadi proses adaptasi bagi setiap basis dalam bekerjasama. Menurut ketua basis penyandang disabilitas Achyani, proses adaptasi bagi setiap anggota menjadi tantangan tersendiri karena perlu untuk saling mengenal satu sama lain dan juga saling menyesuaikan dinamika kerja pada basis tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semua anggota pada tiap basis merasa bisa saling menyesuaikan diri dengan pola kegiatan masing-masing basis (Lampiran 9, hal. a).

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada basis keluarga sesuai dengan hasil laporan kegiatan, mereka melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara *door-to-door*. Dengan memberikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yakni penyelenggaraan Pilwakot Semarang Tahun 2020 seperti hari, tanggal, dan jam pencoblosan dan juga mekanisme pencoblosan. Kegiatan pada basis ini dilaksanakan di rumah warga, mushola, masjid, aula kelurahan, aula kecamatan, dan balai pertemuan warga. Saat sosialisasi dan pendidikan pemilih basis keluarga, Relawan Demokrasi beberapa kali menggunakan alat bantu seperti brosur untuk menunjang penjelasan mereka (Lampiran 6, hal. a).

Anggota basis pemilih pemula Lulu, menjelaskan bahwa sasaran mereka adalah masyarakat yang berusia 17-25 tahun di Kota Semarang yang tergabung

dalam organisasi kemahasiswaan, karang taruna, dan komunitas. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara tatap muka namun ada juga yang melalui *video conference* karena dilakukan di masa pandemi COVID-19. Materi yang disampaikan adalah penjelasan protokol kesehatan saat akan mencoblos termasuk TPS sudah aman menjalankan protokol kesehatan dan juga pentingnya menggunakan hak pilih (Lampiran 7, hal. a). Selama berkegiatan Relawan Demokrasi basis pemilih pemula menggunakan contoh surat suara sebagai bahan pendukung.

Pada basis pemilih muda Lutfi sebagai anggota menjelaskan bahwa mereka menyasar organisasi mahasiswa, karang taruna Kota Semarang. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung lokasi sasaran. Berdasarkan laporan akhir kegiatan basis pemilih muda, metode yang digunakan adalah diskusi dengan kelompok sasarannya dengan bantuan bahan ajar sebagai bahan pendukung sosialisasi. Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disampaikan basis pemilih muda adalah waktu pelaksanaan Pilwakot 2020, pengenalan pasangan calon yang akan dipilih, tata cara memilih yang benar dan aman di era pandemi (Lampiran 8, hal. a).

Gambar 4. 2
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Pemilih Pemula ke Karang Taruna Karsa Tunggal RW 01 Sendangguwo Tembalang
Sumber: Dokumentasi Relawan Demokrasi

Basis penyandang disabilitas memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada komunitas, yayasan disabilitas, dan juga sekolah disabilitas dengan cara langsung mengunjungi lokasi sasaran. Relawan Demokrasi basis penyandang disabilitas melakukan sosialisasi ke berbagai macam komunitas disabilitas dan juga beberapa SLB yang ada di Kota Semarang. Pada laporan akhir kegiatan dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah metode langsung dengan diskusi kelompok. Materi yang disampaikan yakni adanya perbedaan pelaksanaan Pilwakot Semarang Tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 (Lampiran 9, hal. a).

Gambar 4. 3
Sosialiasi dan Pendidikan Pemilih Basis Penyandang Disabilitas ke Komunitas HWDI
Sumber: Dokumentasi Relawan Demokrasi

Anggota basis berkebutuhan khusus Dimas, menjelaskan bahwa sasaran yang dituju adalah pondok pesantren, rumah sakit, panti sosial, lembaga pemasyarakatan (Lapas), masyarakat perbatasan, SLB, dan komunitas difabel. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara langsung mengunjungi lokasi sasaran. Lokasi sasaran tersebut ada di pondok pesantren, rumah sakit, lapas, panti sosial. Relawan Demokrasi menggunakan metode langsung dalam menyampaikan materi. Materi yang disampaikan oleh basis berkebutuhan khusus menurut laporan akhir kegiatan adalah pengetahuan tentang demokrasi, pentingnya datang ke TPS, dan protokol kesehatan di TPS (Lampiran 10, hal. a).

Pada basis perempuan, sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah perkumpulan ibu–ibu yang tergabung dalam PKK, dasa wisma (Dawis). Menurut salah seorang anggota basis perempuan Indri, Relawan Demokrasi basis perempuan secara langsung mengunjungi sasaran. Relawan menyampaikan materi

secara langsung tentang pentingnya peran perempuan dalam Pilwakot Semarang Tahun 2020 (Lampiran 11, hal. a). Selain itu berdasarkan laporan kegiatan Relawan Demokrasi basis peremuan materi yang diberikan adalah adaptasi kebiasaaan baru saat di TPS karena pandemi COVID-19, pembagian jadwal C6 sebagai upaya mengantisipasi kerumunan, dan materi pokok Pilwakot seperti pengecekan DPT melalui laman KPU, pembagian daftar pemilih dan penentuan suara sah atau tidak sah serta mengimbau masyarakat untuk optimis datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya.

Basis marginal melaksanakan sosialisasi secara langsung dan informal kepada sasarannya. Menurut Sarah sebagai anggota basis marginal, sasaran yang dituju pada basis ini adalah penyapu jalanan, pedagang, tukang ojek, nelayan, penjual bunga, pemulung, tukang becak. Materi yang disampaikan oleh basis marginal yakni mengedukasi bahwa mereka memiliki hak untuk memilih dan tidak memilih, memberi tahu prosedur saat ke TPS, penerapan protokol kesehatan yang ketat saat ke TPS, dan menjelaskan bagaimana cara yang baik untuk memilih, serta bagaimana perhitungan kotak suara (Lampiran 12, hal. a).

Gambar 4. 4
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Relawan Demokrasi Basis Marjinal ke Pedagang sekitar Pendrikan Lor
Sumber: Dokumentasi Relawan Demokrasi

Pada basis komunitas, sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara langsung mengunjungi *basecamp* komunitas tersebut. Namun menurut anggota basis komunitas Putra, menjelaskan bahwa pandemi menjadi salah satu penghambat dalam menghubungi komunitas karena sudah tidak aktif berkegiatan selama pandemi (Lampiran 13, hal. a). Sasaran komunitas yang dituju antara lain SAPMA, Backpacker, Pengusaha Muda, IPNU, PPKBD, Bank Sampah, Assosiasai Multiflora, Posyandu Kasih Ananda, Persaudaraan Haji Saptamarga III, Rotari, Lari, UMKM, Dasa Wisma, Tennis, Forum Petani, Senam Adi Yuswo, Kopi Khas NU, PKL. Berdasarkan laporan kegiatan Relawan Demokrasi basis komunitas, materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberikan menurut laporan akhir adalah kewajiban masyarakat ke TPS, gunakan hak pilih, dan suara sah dalam pencoblosan.

Pada basis keagamaan, menurut salah seorang anggota yaitu Heni, cara yang dilakukan untuk dapat menjangkau kelompok sasaran adalah melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sasaran yang dituju oleh basis ini adalah umat dari 6 (enam) agama yang ada di Kota Semarang (Lampiran 14, hal. a). Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menggunakan bahan pendukung berupa *print-out* materi. Materi yang disampaikan berdasarkan laporan kegiatan Relawan Demokrasi basis keagamaan adalah pengenalan anggota tim Relawan Demokrasi, tujuan dari tim Relawan Demokrasi, kriteria peserta yang dapat memberikan hak pilihnya pada Pilwakot Semarang Tahun 2020, fasilitas protokol kesehatan yang disediakan saat di TPS, melakukan pengecakan data pemilih tetap melalui https://lindungi-hak-pilihmu.kpu.go.id serta memberikan motivasi kepada calon pemilih untuk hadir dan memberikan suaranya di TPS pada Rabu, 9 Desember 2020 pukul 07.00-13.00 WIB.

Gambar 4. 5
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Keagamaan ke Umat Hindu di Pura Amerta Tlogosari, Sumber: Dokumentasi Relawan Demokrasi
Sumber: Dokumentasi Relawan Demokrasi

Ketua basis warga internet (warganet) Anin, menjelaskan bahwa Relawan Demokrasi basis warganet menyasar seluruh warga kota Semarang yang bertempat tinggal disekitar anggota Relawan Demokrasi untuk memudahkan perizinan sehingga tidak ada kelompok sasaran khusus. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara tatap muka dengan sasarannya. Selain itu basis warganet juga perlu melakukan sosialisasi melalui media sosial, maka sasaran yang dikunjungi juga diberikan konten materi dan diminta untuk menyebarkan ke WhatsApp grup yang dimiliki (Lampiran 15, hal. a). Berdasarkan laporan kegiatan Relawan Demokrasi basis warganet, materi yang disampaikan oleh basis warganet yakni seputar Pilwakot tanggal 9 Desember 2020, mengenalkan website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id, meyakinkan warga bahwa TPS sudah memenuhi standar protokol kesehatan dan juga mengajak masyarakat untuk datang ke TPS (Lampiran 15, hal. a).

Tanggapan masyarakat saat menerima sosialisasi dan pendidikan pemilih cukup beragam. Pada basis keluarga, masyarakat yang berada di pinggir Kota Semarang seperti Genuk, Tambakrejo, Ngaliyan lebih antusias dibandingkan masyarakat yang berada di tengah Kota Semarang karena masyarakat di daerah tersebut merasa senang mendapatkan perhatian dari pihak KPU Kota Semarang. Sama halnya dengan basis penyandang disabilitas yang sasarannya ada yang antusias namun ada juga yang kurang peduli terhadap sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberikan. Sedangkan pada basis pemilih muda, perempuan, berkebutuhan khusus, marjinal sangat antusias karena banyak pertanyaan yang diajukan saat sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017. Dimana tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun penyebaran informasi tersebut menjadi tidak merata karena pemilihan sasaran yang dilihat dari aspek kemudahan untuk mengurus perizinan. Kemudian dalam meningkatan kesadaran, pada saat pertama dikunjungi diberikan pertanyaan apakah tahu bahwa Kota Semarang akan melaksanakan Pilwakot 2020 selain itu juga ditanyakan tanggal dari pelaksanaan Pilwakot 2020 beberapa sasaran basis masih ada yang belum tahu. Sehingga tejadi peningkatan kesadaran pada masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu terhadap pelaksanaan Pilwakot 2020. Selain itu ada tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu yang juga terwujud karena angka partisipasi masyarakat pada Pilwakot tahun 2020 sebanyak 68,62% dibandingkan pada Pilwakot tahun 2015 angka partisipasi masyarakat yakni 66,46% (Lampiran 4, hal. a).

Selanjutnya materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh Relawan Demokrasi masing-masing basis sudah sesuai dengan SE KPU RI Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020. Materi yang diberikan pada saat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Relawan Demokrasi yakni pentingnya demokrasi, pemilihan, dan partisipasi; tanggal, hari, dan jam pemungutan suara; tata cara pemberian suara pada surat suara, pengenalan terhadap kontestan pemilihan; serta materi lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih. Namun untuk materi pendidikan pemilih tidak dijelaskan lebih lanjut

sehingga kegiatan ini hanya mengedepankan sosialisasi pada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pilwakot Semarang 2020.

Proses komunikasi yang terjadi antara KPU Kota Semarang dan Relawan Demokrasi juga terjalin melalui media sosial maupun laporan kegiatan. Media sosial yang digunakan adalah grup WhatsApp untuk memantau hal-hal administratif dan teknis pelaksanaan di lapangan seperti *sharing* persoalan yang dihadapi dan segera membutuhkan solusi. Kemudian adanya pembuatan laporan untuk pelaporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berisi tanggal kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan, bahan pendukung yang digunakan, evaluasi kegiatan basis, dan dokumentasi kegiatan (Lampiran 4, hal. a).

4.6. Mengevaluasi Program

Saat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih Relawan Demokrasi memberikan kesempatan pada masyarakat sasaran untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran mengenai Pilwakot 2020. Seperti pada basis penyandang disabilitas yang mendapatkan masukan agar TPS aksesibel bagi penyandang disabilitas, pendataan pemilih yang merata dan juga diharapkan ada sarung tangan karet karena jika disediakan sarung tangan plastik akan menyulitkan bagi mereka yang menggunakan krug. Kemudian ada juga masukan untuk KPU Kota Semarang untuk menyiapkan protokol kesehatan sebaik mungkin pada TPS. Kritik dan saran tersebut disampaikan kepada KPU Kota Semarang untuk dapat mempersiapkan dan meningkatkan pelaksanaan Pilwakot Semarang. Sedangkan untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh Relawan Demokrasi, ditampung

terlebih dahulu kemudian disampaikan kepada KPU Kota Semarang sehingga saat kegiatan berikutnya bisa dijelaskan apabila pertanyaan tersebut muncul kembali.

Dengan adanya saran dan kritik yang diterima oleh Relawan Demokrasi dapat mencerminkan bahwa Relawan Demokrasi menjalankan peran kedalam sebagai humas pemerintah. Dimana Relawan Demokrasi menyerap aspirasi atau keinginan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi KPU Kota Semarang demi tercapainya tujuan bersama.

Relawan Demokrasi juga melakukan evaluasi kegiatan melalui laporan akhir yang dibuat untuk KPU Kota Semarang. Pada laporan tersebut dijelaskan bahwa, Relawan Demokrasi menginginkan adanya persiapan bahan pendukung sosialisasi dan pendidikan pemilih yang baik, perlu adanya pendampingan dari pihak KPU Kota Semarang saat sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemetaan kelompok sasaran yang terpusat. Kemudian pasa basis warganet memberikan evaluasi kepada KPU Kota Semarang untuk memberikan akses media sosial pada basis warganet sehingga memudahkan Relawan Demokrasi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial.

Setiap basis Relawan Demokrasi tentu sempat mengalami konflik dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Menurut anggota basis Relawan Demokrasi, sebagian besar konflik yang dialami pada tiap basis adalah kesulitan dalam menyesuaikan waktu dari masing–masing anggota untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena kesibukan di luar Relawan Demokrasi. Hal itu dijelaskan oleh ketua basis marjinal Sarah, dimana terkadang anggota yang

bisa ikut sosialisasi dan pendidikan pemilih hanya orang tertentu saja (Lampiran 12, hal. a). Meskipun sempat terjadi konflik, namun semua basis merasa dapat mengatasi konflik tersebut karena semua anggota bisa bertahan sampai akhir program Relawan Demokrasi. Namun ada juga dari basis pemilih pemula dan basis perempuan yang merasa tidak mengalami konflik dalam kelompoknya (Lampiran 8, hal. a).

Perkembangan dinamika yang dialami setiap basis Relawan Demokrasi selama berkegiatan 3 (tiga) bulan ada yang mengalami kemajuan namun ada juga yang stabil sejak awal hingga akhir. Kemajuan yang dirasakan adalah timbulnya rasa kekeluargaan dari setiap basis. Selain itu meskipun kegiatan Relawan Demokrasi telah berakhir, komunikasi masing–masing anggota tetap berjalan dengan lancar seperti yang disampaikan oleh Sarah anggota basis marginal (Lampiran 12, hal. a).

Komisioner KPU Kota Semarang Novi Maria menjelaskan bahwa, program Relawan Demokrasi berhasil dalam membentuk, memelihara serta meningkatkan reputasi dari KPU Kota Semarang. Dimana terlihat dari angka partisipasi masyarakat yang meningkat dari tahun sebelumnya. Besar kecilnya peningkatan yang terjadi tentunya merupakan andil dari Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi juga telah menjadi penghubung antara KPU Kota Semarang dan masyarakat. Dimana Relawan Demokrasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi wadah untuk menerima saran, kritik maupun pertanyaan dari masyarakat yang dapat membantu untuk menyukseskan pelaksanaan Pilwakot 2020.

Program Relawan Demokrasi juga menimbulkan hubungan internal yang kondusif dan dinamis dengan KPU Kota Semarang sebagai mitra kerja karena keterbukaan satu sama lain terhadap kegiatan di lapangan. Kemudian hubungan secara eksternal yakni KPU Kota Semarang dengan masyarakat juga tebantu melalui adanya program Relawan Demokrasi yang memberikan informasi, pengetahuan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih (Lampiran 4, hal. a).

Program Relawan Demokrasi telah memberikan kemudahan akses informasi mengenai Pilwakot 2020 bagi masyarakat dengan menyampaikan materi keseluruhan tahapan Pilwakot, tata cara memilih yang baik dan benar, protokol kesehatan di TPS, pengenalan pasangan calon, serta mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS dan berpartisipasi pada Pilwakot 2020. Relawan Demokrasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya maupun memberikan saran yang berguna untuk pelaksanaan Pilwakot 2020 agar berjalan dengan lancar. Aspek mekanisme pengambilan keputusan masyarakat bukan tanggung jawab dari Relawan Demokrasi karena hal tersebut merupakan keputusan dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Keputusan tersebut juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilwakot Semarang 2020 sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat (Lampiran 4, hal. a).